



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO PRAYITNO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, KELEMBAGAAN
DAN KERJASAMA**
3. NHK : **1000667**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m²/150 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1.700 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1.250 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1.250 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m²/42 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m²/42 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m²/150 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp. 600.000.000
8. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp. 1.200.000.000
9. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp. 1.200.000.000



10. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp.
1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.961.280

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.515.961.280

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.355.961.280

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.